

PERAN GURU DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Yeti

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email: yetisafitri468@gmail.com

ABSTRACT

Anti-corruption education has become something that stands out amidst the complexity of the challenges of corruption and requires the participation of society and institutions. This education is not only aimed at conveying information, but is also an instrument for forming character so that there is no corruption. Because with anti-corruption education, the nation's children in the future will be protected from the existing culture of corruption. With such an approach, this paper hopes to be able to carry out an analytical synthesis to produce a theoretical concept of faith-based PAK that can be applied visibly in the classroom learning process and can be successfully implemented in everyday life. If this concept can be applied, it is hoped that students' perspective on religious values that can be applied in life experiences will change. It is hoped that this will enable the process towards a cleaner Indonesian society.

Keyword: *Anti-Corruption Education; Student; Public.*

ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi menjadi hal yang menonjol ditengah kerumitan tantangan korupsi dan memerlukan partisipasi masyarakat, serta institusi. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan instrumen untuk membentuk karakter agar tidak memiliki sifat korupsi. Karena dengan pendidikan anti korupsi anak bangsa dimasa yang akan datang akan terhindar dari budaya korupsi yang ada. Dengan pendekatan seperti itu, tulisan ini berharap mampu melakukan sintesa analitis sehingga menghasilkan konsep teoritis PAK berbasis

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

keimanan yang dapat diterapkan secara kasat mata dalam proses pembelajaran di kelas dan dapat berhasil diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika konsep ini dapat diterapkan, diharapkan cara pandang siswa terhadap nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam pengalaman hidup akan berubah. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan proses menuju masyarakat Indonesia yang lebih bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi; Siswa; Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan antikorupsi merupakan suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perbuatan salah atau korupsi. Edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat dari praktik korupsi. Istilah ini juga dapat merujuk pada penggunaan sumber daya pemerintah untuk keuntungan pribadi. Karena maraknya kasus korupsi di Indonesia, maka perlu tidak hanya memberikan hukuman yang lebih tegas kepada pelakunya, namun juga melakukan upaya preventif seperti melalui pendidikan sejak sekolah dasar (SD) dan seterusnya. Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kerangka Sekolah Negeri, Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa pelatihan dilaksanakan sebagai interaksi perkembangan dan bermanfaat seumur hidup. Pendidikan antikorupsi, setidaknya di negara mana pun, harus bertujuan untuk menanamkan semangat antikorupsi pada generasi muda.¹

Melalui pendidikan antikorupsi, generasi muda diharapkan memahami nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini. Hal ini penting agar mahasiswa dapat berkembang menjadi manusia yang berkomitmen memerangi korupsi dalam segala bentuknya dan menjaga transparansi di berbagai bidang kehidupan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang membentuk kemampuan kognitif, emosional, dan psikomotorik siswa. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai tanggung jawab organisasi formal yang sesuai dengan misi dan tujuannya dalam hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Dan untuk mencapai pendidikan yang bermutu perlu dilakukan pengelolaan sumber daya yang ada pada lembaga pendidikan dan sekolah secara profesional, dan merupakan salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik

¹ Nestariana, Ria (2023). 'Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar'. Jurnal: Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran, Vol 01 No 01.

dalam lembaga pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang terstruktur dan komprehensif, 4.444 sekolah kami berperan penting dalam membangun landasan. Mengembangkan potensi anak, mempersiapkan mereka menuju masa depan yang sukses. Pada tingkat dasar, sekolah memegang peranan penting dalam mengajarkan dasar-dasar pendidikan kepada anak. Diajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Sekolah dasar tidak hanya fokus pada bidang akademik saja, namun juga berperan dalam membentuk karakter dan moral anak (Setiani & Barokah, 2021).²

Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi negara, namun juga menggerogoti nilai-nilai moral masyarakat, termasuk pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah berperan penting dalam membangun karakter generasi muda yang bebas dari praktik korupsi. Dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa sejak dini. Dalam konteks ini, pengembangan pendidikan karakter melalui kurikulum antikorupsi diharapkan dapat menghasilkan generasi yang berintegritas tinggi dan tahan terhadap godaan korupsi.

Oleh karena itu, arti kata korupsi adalah korup, brutal, dan destruktif, mengingat demonstrasi korupsi mempunyai arti: jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan dan parlemen mekanis, penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat atau kondisi yang korup, seperti pemberian yang korup, pengalihan kekuasaan finansial dan politik; variabel, dan masa jabatan karena hubungan keluarga atau perkumpulan dalam pemerintahan berdasarkan patronase pemerintah. Bentuk-bentuk korupsi - Pelanggaran keuangan negara - Pembayaran kembali - Penyalahgunaan kekuasaan - Pemaksaan - Demonstrasi palsu - Situasi yang tidak sesuai dalam memperoleh Banyak orang beranggapan bahwa pencemaran nama baik sudah menjadi budaya di Indonesia, terutama sejak kemerdekaan. Periode permintaan lama, periode permintaan baru, dan periode pemulihan saat ini, dan banyak pihak yang mengatakan bahwa kemajuan yang dicapai masih lemah. Hal ini sangat berbeda dengan anggapan banyak orang (Ali, 2022). Oleh karena itu, meskipun strategi dan metode kita berbeda, secara kolektif kita harus terus berupaya mencari cara untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas demonstrasi korupsi secara tuntas. Itu sebabnya kita juga perlu menggunakan pendekatan berbeda untuk mencegahnya.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya sekedar wadah pembelajaran, tetapi juga merupakan upaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mentransformasikan kehidupan masyarakat dan mencapai kesejahteraan, membentuk nilai-nilai dan sikap-sikap yang diperlukan untuk maju sesuai dengan UUD 1945 berfungsi sebagai dasar untuk Salah satu yang diajarkan dalam dunia pendidikan adalah pendidikan antikorupsi. Hal ini untuk mengelola sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan

² Ikrom Shaliadi, Moh. Dannur(2023). ' Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.' Jurnal: Of Legal Studies, Vol 1 No 1.

budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan sejalan dengan visi dan misi Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan kemampuan untuk mengembangkan karakter dan sikap masyarakat. Itu sebuah prosedur. Menjelaskan peradaban. Kebejatan, kehancuran, kejahatan, penyuapan, dan amoralitas. Dengan kata lain, ini mencakup tindakan jahat seperti penggelapan uang dan penyuapan.

Korupsi di sektor pendidikan merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan dan mempunyai implikasi jangka panjang terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Korupsi di bidang pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: B. Penyalahgunaan dana suap dalam penerimaan mahasiswa, dan manipulasi pengelolaan sumber daya. Pendidikan seharusnya menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan karakter dan moralitas seseorang, namun praktik korupsi dapat melemahkan tujuan tersebut dan menghambat akses serta kualitas pendidikan. Hal ini tidak hanya merugikan lembaga pendidikan, namun juga menghambat pembentukan karakter peserta didik yang seharusnya dibekali dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Korupsi di sektor pendidikan merupakan peristiwa yang merugikan dan menghambat kemajuan. Penipuan sering kali berupa penyelewengan dana, penyuapan dalam penerimaan siswa, dan pemanfaatan lembaga pendidikan untuk keuntungan pribadi. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga menurunkan kualitas pendidikan yang layak diterima siswa.

Korupsi di lingkungan pendidikan mengacu pada berbagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dana, dan sumber daya yang seharusnya disediakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Praktik korupsi di lingkungan sekolah antara lain penyelewengan dana sekolah, pungutan liar, nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai, penjualan jawaban ulangan, dan masih banyak lagi bentuk korupsi lainnya yang berdampak buruk pada proses pendidikan. Oleh karena itu, upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda dinilai bisa menjadi langkah efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penanggulangan korupsi di lingkungan pendidikan memerlukan waktu dan upaya yang konsisten, namun harapan besar agar Indonesia menjadi negara bebas korupsi di masa depan masih menjadi tujuan yang bisa dicapai (Rilo Pambudi. S dkk, 2021). Korupsi di lingkungan sekolah menengah atas (SMA) sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang jujur dan sehat. Perilaku korupsi di lingkungan sekolah tidak hanya dapat menurunkan semangat kerja siswa tetapi juga menghambat proses pembelajaran dan menimbulkan ketimpangan akses terhadap pendidikan.³

³ Saipul Ma'arif, Edy Soesanto, Wangsit Satriandaru, Aditya Dwi Laksono (2023). ' Pencegahan Korupsi Dan Dampak Massif Korupsi Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas.' Jurnal: Cendikia Pendidikan, Vol 2 No 6.

II. PERMASALAHAN

- Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi?

III. METODE PENELITIAN

Gaya penulisannya didasarkan pada studi literatur dan sumber. Strategi antikorupsi dengan pendekatan pendidikan formal dapat dilaksanakan melalui kurikulum antikorupsi yang diterapkan di sekolah formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Strategi antikorupsi dengan pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuktikan dengan keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas korupsi di wilayah Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

Didirikan atas dasar Pancasila, Indonesia berkomitmen kuat untuk mewujudkan hukum yang adil dan merata, yang diartikulasikan dalam sila pertama ketuhanan dan sila kedua kemanusiaan. Tentunya hal ini erat kaitannya dengan pendidikan dan akhlak masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan humanistik adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kedewasaan manusia melalui bimbingan dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, seperti menjaga eksistensi manusia, kehormatan dan martabat, kreatif, termotivasi, kooperatif, dan percaya diri, mempunyai moral dan rasa tanggung jawab. Humaniora dalam pendidikan merupakan pola perilaku yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia seutuhnya. Potensi tersebut dapat diwujudkan ketika pendidikan mampu mengubah pola pikir dan perilaku individu sehingga menghasilkan pengembangan karakter yang bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, negara dan bangsa. Proses pengembangan karakter ini dimaksudkan untuk memanusiakan manusia dan memberi manfaat bagi orang banyak. Nilai-nilai humanistik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sikap humanistik yang menitikberatkan pada kemanusiaan dan keterhubungan.

Pendidikan harus mengembangkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan luas, budi pekerti yang baik, dan kemampuan memperoleh keterampilan. Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu membawa perubahan pada masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan di sekolah dasar dan menengah, pendidikan terbukti memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan lebih adil (Percy dan Svenson, 2016). Pendidikan harus mampu tidak hanya mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, namun juga harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman yang memungkinkan setiap orang sadar tanpa harus diminta oleh orang lain untuk menghindari korupsi. Menurut Becker, Hauser,

dan Kronthaler (Tanaka, 2001), sebagian besar siswa mengalami kesulitan mengenali tindakan yang mewakili korupsi sebagai akibat dari perilaku korup. Selain itu, upaya prediksi korupsi juga harus dibarengi dengan kesadaran untuk mendeteksi praktik korupsi. Meskipun kita telah mengetahui bahwa praktik korupsi itu dilarang, namun tetap saja hal tersebut terjadi karena lingkungan disekitarnya terdapat praktik korupsi. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar Anda secara tidak langsung menjadi contoh perbuatan terlarang tersebut. Selain itu, anak sekolah dasar cenderung meniru apa yang dilihatnya. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya komprehensif dan tulus untuk meningkatkan rasa hormat terhadap bangsa.⁴

Keberhasilan dalam membangun sistem pendidikan yang baik merupakan upaya penting dalam mencapai tujuan kemajuan sosial secara umum. Tujuan mendasar pendidikan meliputi psikologis (berdasarkan data penelitian), emosional (berfokus pada emosi, mentalitas, rasa syukur, nilai-nilai, atau tingkat kinerja tertentu), dan psikomotorik (praktis). Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya otoritas nasional untuk meningkatkan kesadaran dan nilai-nilai siswa di lingkungan sekolah yang menolak korupsi. Penghinaan sendiri bukanlah sebuah bukti yang disayangkan bahwa banyak orang yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Sekolah dasar merupakan masa penting bagi siswa untuk memperoleh informasi dan mengembangkan kepribadiannya. Artinya sekolah dasar mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter siswa. Melalui pembelajaran di sekolah dasar terbentuk kecenderungan dan sikap positif terhadap nilai-nilai moral. Oleh karena itu, perlu adanya metode untuk memberikan pendidikan karakter positif pada siswa di sekolah dasar.

Karena anak-anak tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh partai politik mana pun, pemerintah harus fokus pada perlakuan dan inisiatif yang menunjukkan peran dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak perlu adanya kepastian hukum untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan oleh anak. Penanggulangan kekerasan pada anak memerlukan sistem perlindungan terpadu yang merupakan salah satu bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak (Widyantoro, Dewi & Fathonah, 2019). Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ini merupakan serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Pada kenyataannya, anak-anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai perlakuan yang merugikan mereka secara sosial, fisik dan mental di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan mereka. Anak merupakan generasi pembawa cita-cita bangsa, potensi yang dimilikinya, dan benih-benih yang dimilikinya, oleh karena itu kita harus menggalakkan perlindungan anak sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan

⁴ Dairani, Fathorrahman, Faradilla Mutiara Nisa (2022). 'Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar'. Jurnal: Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol 1 No 2.

sampai dengan usia 18 tahun, serta melindungi anak-anak yang kelak menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus harus dibudayakan. Tanggung jawab ini memiliki anak memerlukan kesempatan untuk berkembang secara optimal secara sosial, mental, dan fisik. "Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dinikmati oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat, dengan jelas diatur bahwa hal itu harus dilakukan dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah.⁵

Kejujuran adalah tonggak terpenting dalam membangun negara menjadi lebih baik. Negara yang menjunjung tinggi kejujuran adalah negara yang memiliki standar moral yang tinggi. Ironisnya, meski mayoritas penduduknya beragama Islam, negara ini belum memiliki budaya kejujuran yang mapan. Situasi serupa juga terjadi pada praktik korupsi yang masih sulit diberantas. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam yang besar, integritas seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, namun kondisi tersebut masih belum terpenuhi.

Menurut Albert Hendra Wijaya, kejujuran adalah kemampuan mengakui, berbicara dan memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Dengan kata lain, orang jujur tidak menyembunyikan informasi sebenarnya. Sebaliknya, kami dengan senang hati membagikan informasi kebenaran kepada siapapun yang membutuhkannya. Ada tiga aspek kejujuran. Kejujuran verbal, aktif, dan tulus berarti mengucapkan setiap perkataan dengan sebenar-benarnya, tanpa pengurangan dan penambahan. Sebaliknya, integritas dalam bertindak berarti selalu melakukan hal yang benar, seperti tidak berbuat curang, tidak melakukan korupsi, dan menahan diri dari segala tindakan yang merugikan kemanusiaan. Kejujuran hati berarti meyakini secara mendalam bahwa kejujuran adalah bagian dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh semua manusia, dan meyakini bahwa perbuatannya akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁶

Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak usia dini. Pelatihan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan psikologis pelajar dan generasi muda. Melalui pendidikan antikorupsi, anak dapat memasuki masyarakat tanpa terpengaruh dan memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan tersebut. Dengan begitu, budaya korupsi tidak akan terus melekat pada mereka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi budaya korupsi, seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghilangkan dan mencegah korupsi. Inisiatif-inisiatif ini telah membawa banyak perubahan dalam mengurangi korupsi yang ada. Namun, untuk

⁵ Zainudin Hasan (2023). 'Perlindungan Hukum Terhadap anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana'. Jurnal: Hukum dan Sosial Politik, Vol 1 No 3.

⁶ Malin Azzarima, Hervin Risky Pratama, Mita Wahyu Settiya (2023). 'Implementasi Pendidikan Karakter Kejujuran Pada Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Dasar'.

mencapai status negara bebas korupsi, warga negara juga harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Tentu saja memberantas korupsi tidak memerlukan proses dan waktu. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini sangat penting untuk mencegah kejahatan korupsi terus meningkat di seluruh Indonesia. Untuk mencegah korupsi, peran serta masyarakat setempat khususnya anak-anak dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa juga sangat penting. Dengan cara ini, diharapkan pelajar dapat belajar tentang perilaku antikorupsi sejak dini dan menularkan ilmu tersebut kepada masyarakat sekitar sehingga mendorong aktivisme pelajar yang aktif. Upaya tersebut juga harus melibatkan orang tua, masyarakat, akademisi dan pihak lain untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi melalui pendidikan.⁷

Korupsi memiliki jaringan dan jangkauan yang sangat luas, tidak hanya terjadi di dalam birokrasi pemerintahan namun juga merambah ke bidang lain seperti politik dan ekonomi. Korupsi masih tersebar luas di birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kami menilai sulit untuk mengidentifikasi institusi mana di negeri ini yang tidak terlibat dalam praktik korupsi. Fenomena ini menyebabkan banyak kalangan, termasuk akademisi, sering menyebut korupsi sebagai “gaya hidup”, “budaya”, atau istilah serupa lainnya di Indonesia. Istilah ini menunjukkan bahwa korupsi tersebar luas dan sistematis di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit tanpa dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh penjurur negeri. Saat ini, penerimaan masyarakat terhadap korupsi bukanlah persoalan khusus. Artinya, system sosial masyarakat kita telah kehilangan kendali atas permasalahan tersebut, sehingga para pelaku korupsi besar yang dipenjara seringkali lolos dari sanksi sosial. Begitu mereka terjerat oleh hukum, mereka tidak mampu memikul beban spiritual dan sosial dari masyarakat di mana mereka diadungkan.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar dimana siswa secara aktif mengembangkan potensinya. Kompetensi guru merupakan keterampilan yang harus diperoleh agar dapat mencapai hasil kerja yang baik dan efektif (Rina Febriana, 2021). Guru tidak hanya berperan dalam membangun kecerdasan intelektual siswa, namun juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan keagamaan dan sosial serta membentuk perilaku antikorupsi. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar mutu tertentu, antara lain tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, dan disiplin. Tugas guru sebagai pendidik adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak, memperoleh pengalaman tidak hanya dalam keterampilan dasar, tetapi juga dalam tanggung jawab moral dan sosial. (Mutmaina & Kamaruddin, 2019). Guru merupakan pionir pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.⁸ Pencegahan korupsi melalui pendidikan dapat

⁷ Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari (2024).’ Jurnal: Of Accounting Law Communication And Technology, Vol 1 No 2

⁸ Wahyu Pradya Rizky, Bambang Sumardjoko (2023).’ Peran Guru Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik.

dikatakan sebagai cara yang efektif. Pendidikan adalah proses mengubah cara pandang dan pola pikir seseorang melalui pendekatan yang lebih teratur dan terukur agar selaras dengan perubahan perilaku yang menangkal pencemaran mental. Pencegahan polusi tidak dapat dipahami tanpa upaya sadar untuk mengembalikan kemampuan generasi muda dalam mengembalikan kerangka nilai.

Pendidikan antikorupsi yang fokus pada penanaman nilai-nilai akan menjadi benteng pertahanan asimilasi nilai-nilai antikorupsi di kalangan generasi muda dan mentransformasikannya menjadi gaya hidup anti korupsi. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, instruksi yang jelas tentang cara menangani masalah ini sangatlah penting. Pemecahan masalah harus dilakukan secara efektif dengan memberikan pemahaman dan perhatian yang benar melalui berbagai program bantuan. Sosialisasi dapat dilakukan di lingkungan keluarga, organisasi, jaringan, dan terutama sekolah untuk memastikan korupsi tidak terjadi lagi (Moran, 2002: 75; Gephart, 2016: 49-77). Tempat untuk mengasimilasi nilai-nilai - Mark. Dengan kata lain, sekolah mengadopsi pendekatan halus dan bernuansa untuk melanjutkan upaya penanaman nilai dan perilaku anti korupsi (Zakariya, 2015).⁹

Korupsi sepertinya sudah menjadi industri di negeri ini. Tidak mengherankan jika Indonesia selalu menempati peringkat tinggi dalam daftar negara paling korup. Kesenjangan peraturan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah menciptakan potensi korupsi dalam inflasi anggaran. Celahnya adalah Anda bisa membuat janji langsung tanpa iklan. Riset Indonesia Procurement Watch (IPW) menunjukkan bahwa 83% proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selalu berakhir pada praktik inflasi harga. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah (Keppres) membuka kemungkinan penunjukan langsung. Namun hal tersebut hanya diperbolehkan untuk pengadaan barang yang nilainya kurang dari 50 juta rupiah, dalam keadaan darurat seperti bencana alam, dan untuk pengadaan yang berkaitan dengan rahasia negara, dan hanya perusahaan tertentu yang dapat melaksanakannya. Sayangnya, pejabat pemerintah sering kali melakukan penunjukan langsung dengan alasan darurat. Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tanpa lelang, ditemukan bahwa penunjukan lembaga pengadaan dan pengelola proyek terutama didasarkan pada faktor-faktor berikut: Saya melakukannya. Tampaknya. Ikatan keluarga, hubungan antara manajer fasilitas dan karyawan yang terlibat.¹⁰

⁹ Ami Dianita, Revita Yuni, Abed Nego, Firman Saputra, Fransiska Adelia, Iqbal Syahputra, MHD Rifqi Farhan(2024). 'Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pendidikan. Jurnal: Sanskara Pendidikan dan Pengajaran', Vol 2 No 01.

¹⁰ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan (2022). 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara'.

V. KESIMPULAN

Mengingat pendidikan berkaitan dengan tumbuh kembang peserta didik, maka pendidikan antikorupsi sangat penting untuk diwaspadai. Jika sektor pendidikan mempunyai sikap antikorupsi, maka korupsi akan berakhir. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk mengembangkan karakter jujur agar tidak melakukan korupsi, dan peran guru dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi di lingkungan sekolah sangat signifikan dan memiliki dampak yang luas terhadap pembentukan karakter siswa, Pendidikan karakter yang terintegrasi dengan materi anti-korupsi berperan penting dalam menanamkan kesadaran kepada siswa sejak dini mengenai bahaya korupsi dan bagaimana mencegahnya. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi institusi yang membentuk sikap dan perilaku siswa dalam menghadapi tantangan etika di masa depan, sekolah juga perlu menerapkan transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan secara konsisten dan adil, serta mengadakan pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah dan menangani korupsi di sekolah sekolah juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Dianita, Revita Yuni, Abed Nego, Firman Saputra, Fransiska Adelia, Iqbal Syahputr, MHD Rifqi Farhan. *Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi Di Sekolah Pendidikan.*Jurnal: Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran, Vol 2 No 01.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Metro Yang Di Lakukan Oleh Aparatut Sipil Negara.*
- Dairani, Fathorrahman, Faradilla Mutiara Nisa. *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar.* Jurnal: Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol 1 No 2.
- Ikrom Shaliadi, Moh. Dannur. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.* Jurnal: Of Legal Studies, Vol 1 No 1.
- Malin Azzarima, Hervin Riaky Pratama, Mita Wahyu Settiya. *Implementasi Pendidikan Karakter Kejujuran Pada Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah Dasar.*
- Nestariana, Ria. *Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar.* Jurnal: Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran, Vol 01 No 01.
- Saipul Ma'arrrip, Edy Soesanto, Wangsit Satriandaru, Aditya Dwi Laksono. *Pencegahan Korupsi Dan Dampak Massif Korupsi Pada Lingkungn Sekolah Menengah Atas .*Jurnal: Cendika Pendidikan, Vol 2 No 6.
- Wahyu Pradya Rizky, Bambang Sumardjoko. *Peran Guru Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik.*
- Zainudin Hasan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.* Jurnal: Hukum Dan Sosial Politik, Vol 1 No 3.
- Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindari. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa.* Jurnal: Of Accounting Law Communication and Technologi, Vol 1 No 2.